

**MITIGASIRISIKOBANKSYARIAHDALAMMENANGANI
PERMASALAHAN FRAUD MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Nia Karmila Amanda

NPM : 1651020531

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**MITIGASI RISIKO BANK SYARIAH DALAM MENANGANI
PERMASALAHAN FRAUD MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Nia Karmila Amanda

NPM : 1651020531

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

Pembimbing II : M. Yusuf Bachtiar, M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Oleh:

Nia Karmila Amanda

Sejak berdirinya Perbankan Syariah berbagai kontroversi muncul dari masyarakat, masalah yang paling banyak disorot adalah pelekatan label syariah yang masih dianggap belum layak. Hal tersebut timbul karena persepsi masyarakat yang ragu pada konsistensi entitas bisnis syariah dalam menerapkan prinsip syariah pada kegiatan usahanya. Keraguan masyarakat tersebut seolah terjawab dengan munculnya kasus *fraud* yang terjadi di BSM cabang Bogor yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif sebesar 102 Miliar kepada 197 nasabah fiktif. Kehilangan kepercayaan dalam masyarakat akan berdampak pada penarikan dalam jumlah besar oleh masyarakat, sehingga perbankan akan menjadi sulit dalam memenuhi likuiditasnya dan akan menyebabkan bank tersebut *collapse*. Maka sebab itu perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik. Dengan terciptanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan nantinya dapat membantu pihak internal bank dalam menjaga aset, keuangan, dan aktiva yang dimiliki bank.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mitigasi yang dilakukan BSM KCP Kedaton dalam menangani kasus *fraud*, bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut PBI, dan Bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut perspektif Ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi yang dilakukan BSM KCP Kedaton Bandar Lampung dalam menangani kasus *fraud*, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut PBI, dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan BSM KCP Kedaton dalam menangani kasus *fraud* yaitu melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan dan jajaran yang ada di BSM KCP Kedaton, melakukan pemeriksaan pada setiap catatan transaksi masuk dan keluar, memberikan doktrin anti *fraud* pada seluruh karyawan serta jajaran, dan membuat mekanisme pelaporan yang efektif atas kasus *fraud*. Hal tersebut dirasa sejalan dengan aturan yang telah dibuat oleh BI tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, namun dalam perspektif Ekonomi Islam penanganan anti *fraud* yang dilakukan oleh BSM KCP Kedaton Bandar Lampung dirasa belum memiliki relasi yang kuat. Hal tersebut dikarenakan BSM KCP Kedaton Bandar Lampung belum menerapkan mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* yang berlandaskan asas ekonomi islam.

Kata Kunci: Tindakan Fraud. Strategi, Perbankan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nia Karmila Amanda**
NPM : **1651020531**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Mitigasi Risiko Bank Syariah Dalam Menangani Permasalahan *Fraud* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BSM KCP Kedaton Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaium WarahmatullahinWabarakatuh

Bandar Lampung, 2 November 2020
Penulis,



Nia Karmila Amanda
NPM. 1651020531



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Mitigasi Risiko Bank Syariah Dalam Menangani
Permasalahan *Fraud* Menurut Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Pada BSM KCP Kedaton
Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Nia Karmila Amanda

NPM : 1631020531

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

untuk dimunagosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munagosyah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Moh Bahrudin, M. Ag

NIP. 195808241989031003

Pembimbing II

M. Yusuf Bachtiar, M.E

NIP. 198912082011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Etike Anggrani, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suraimin Sukaramé Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"MITIGASI RISIKO BANK SYARIAH DALAM
MENANGANI PERMASALAHAN FRAUD MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BSM KCP KEDATON BANDAR
LAMPUNG).**" disusun oleh Nia Karmila Amanda, NPM : 1651020531,

Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari

Tanggal : 01 Desember 2020, pukul : 15.00 – 17.00 WIB

Tim Munaqasyah

Ketua

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

Sekretaris

Dedi Satriawan, M.Pd.

Penguji I

Dr. Nasrudin, M.Ag

Penguji II

M. Yusuf Bahtiar, M.E.

Mengetahui

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruzlan Abdul Ghofur, M.S.I.

198008012003121001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu (membawa) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 188).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rencananya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika berusaha dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada:

1. Almarhum Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Nurhayati tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga. Penulis menghanturkan banyak terimakasih atas seluruh perjuangannya dalam memberikan dorongan materi maupun non materi dan juga dalam memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak kakakku Yulia Pariska dan Dewi Putri Hernayati yang selalu memberi semangat dan selalu memotivasi penulis.
3. Teman-teman seperjuangan dari semester awal hingga sekarang Mila, Monik, Hany, Rani, Shintia, Susan, Viah, Tiara yang selalu memberi semangat, selalu jadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah, kebahagiaan serta canda dan tawa, karena kalian masa kuliah ini menjadi masa yang menyenangkan untuk diingat.
4. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya PSH 2016 yang telah menjadi bagian dari indahnya masa perkuliahan.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nia Karmila Amanda. Anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari Alm. Bapak Hermansyah dan Ibu Nurhayati. Dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1998 di Bandar Lampung.

Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Labuhan Dalam pada tahun 2004-2010
2. SMPN 20 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013
3. SMAN 13 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program study Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

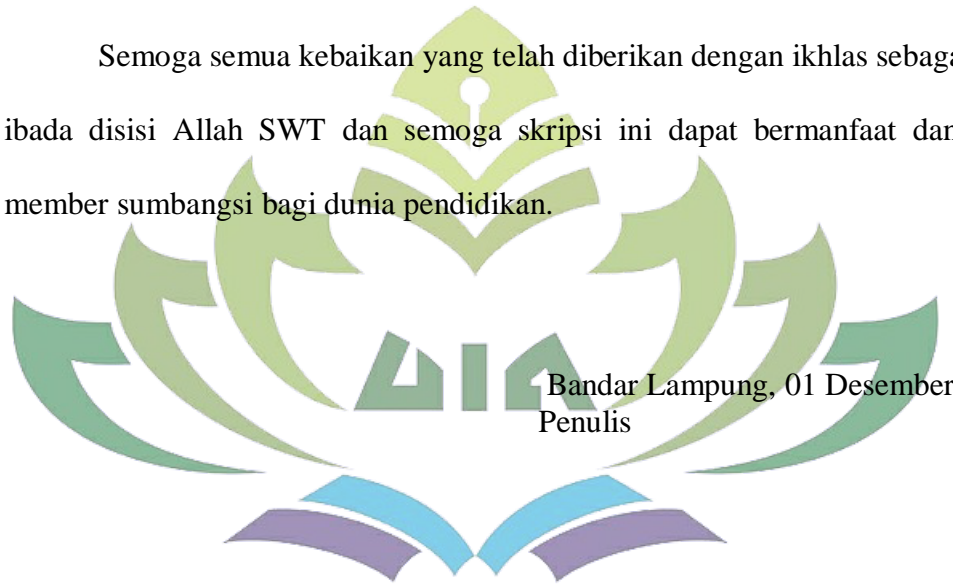
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Mitigasi Risiko Bank Syariah Dalam Menangani Permasalahan *Fraud* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BSM KCP Kedaton Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Moh Bahrudin M. Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I yang selalu sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan, masukan, nasehat serta waktunya selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak M. Yusuf Bachtiar, M.E. selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, kepercayaan dan waktunya yang sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Ibu Dosen, serta Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. BSM KCP Kedaton Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas sebagai amal ibadah disisi Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat member sumbangsi bagi dunia pendidikan.



Bandar Lampung, 01 Desember 2020
Penulis

Nia Karmila Amanda
NPM. 1651020531

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang	5
D. Focus Masalah.....	15
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan Penelitian	16
G. Signifikansi Penelitian.....	16
H. Metode Penelitian.....	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Mitigasi	
1. Pengertian Mitigasi	25
2. Tujuan Mitigasi	25
B. Risiko	
1. Definisi Risiko.....	25
2. Jenis-Jenis Risiko	26

C. Manajemen Risiko	
1. Definisi Manajemen Risiko.....	28
2. Ruang Lingkup Manajemen risiko	29
3. Proses Manajemen Risiko	29
4. Penerapan Manajemen Risiko	31
5. Tujuan Manajemen Risiko	33
D. Lembaga Perbankan	
1. Pengertian Bank.....	34
2. Jenis-Jenis Bank	35
3. Fungsi Bank.....	36
4. Sejarah Perkembangan Bank Syariah.....	37
E. <i>Fraud</i>	
1. Definisi <i>Fraud</i>	38
2. Bentuk-Bentuk <i>Fraud</i>	39
3. Faktor Penyebab <i>Fraud</i>	41
4. Pengendalian <i>Fraud</i> Dalam Perbankan	43
5. Mekanisme Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	45
F. Ekonomi Islam	
1. Definisi Ekonomi Islam	46
2. Karakteristik Ekonomi Islam	47
3. Tujuan Ekonomi Islam.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BSM KCP Kedaton Bandar Lampung	
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	58
2. Profil Perusahaan.....	60
3. Visi dan Misi	60
4. Struktur Organisasi BSM KCP Kedaton Bandar Lampung.....	61
5. Kegiatan Operasional	65
B. Deskripsi Data Penelitian	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Mitigasi Yang dilakukan BSM KCP Kedaton Bandar Lampung Dalam Menangani Kasus <i>Fraud</i>	78
B. Mekanisme Penanganan Tindakan <i>Fraud</i> Menurut Peraturan Bank Indonesia.....	79
C. Mekanisme Penanganan Tindakan <i>Fraud</i> Menurut Perspektif Ekonomi Islam	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

1. Grafik Jumlah Internal Fraud Setiap Bank Syariah Di Indonesia
Periode 2015-2019.....12
2. Proses Manajemen Risiko30
3. Unsure Pendorong Perilaku *Fraud*42
4. Kerangka Pemikiran56
5. struktur organisasi BSM KCP Kedafton Bandar Lampung62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Blanko Konsultasi
2. Lampiran 2 : Berita Acara Sempro
3. Lampiran 3 : Notulen Sempro
4. Lampiran 4 : SK Pembimbing
5. Lampiran 5 : Surat Prariset
6. Lampiran 6 : Surat Riset
7. Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
8. Lampiran 8 : Dokumentasi
9. Lampiran 9 : Berita Acara Munaqasyah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai penulisan skripsi ini, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca, maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: “Mitigasi Risiko Bank Syariah Dalam Menangani Permasalahan Fraud Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Mitigasi

Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.¹

¹ Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 9 (On-line). Tersedia di: <http://www.alinea.id/kolom/mitigasi-dan-pelembagaan-penanggulangan-bencana-b1U7p9eyW> (5 Desember 2019).

2. Risiko

Risiko adalah bahaya. Risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.²

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariat.³

4. *Fraud*

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

5. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk

² Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4.

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5.

⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Strategi Anti Fraud Pada Bank Umum (On-line), tersedia di: <http://www.bi.go.id> (5 Desember 2019).

memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁵

Maksud Judul

Setelah dijelaskan makna setiap kata dari judul yang dipilih maka selanjutnya penulis akan menerangkan makna judul secara keseluruhan mengenai Mitigasi Risiko Bank Syariah Dalam Menangani Permasalahan *Fraud* Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Yaitu bermaksud untuk mencari dan mengetahui tentang bagaimana mitigasi dan upaya yang dilakukan bank syariah dalam menanggulangi risiko atas tindakan *fraud* yang terjadi di dalam Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung serta bagaimana tata cara penanganan tindakan anti *fraud* menurut Peraturan Bank Indonesia dan menurut Perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Tindakan *fraud* yang sering terjadi di dalam dunia perbankan menjadi permasalahan utama. Bukan tanpa alasan, kecurangan adalah salah satu faktor terbesar dalam menimbulkan kerugian. Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal tidak hanya merugikan

⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), h. 5.

perusahaan saja tetapi juga merugikan banyak pihak diantaranya pemegang saham, investor, nasabah dan pihak-pihak lain yang bermitra dengan bank tersebut. Tindakan *fraud* yang terjadi dalam bank syariah juga membuat citra bank syariah dimata nasabah menjadi buruk. Hal tersebut dikarenakan pelekatan label syariah yang dipandang masyarakat belum sepenuhnya layak. Meskipun beridentitas syariah tidak menjamin suatu bank terbebas dari tindak kecurangan. *Fraud* yang sering terjadi dalam perbankan tentu membuat resah pihak-pihak terkait bank, untuk itu perlu dilakukannya pengendalian atau mitigasi oleh pihak manajemen bank atas tindakan *fraud* yang sering terjadi. Pihak manajemen bank harus lebih ekstra dalam mengendalikan *fraud* serta membuat strategi-strategi anti *fraud* untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan lagi aksi-aksi *fraud*. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui strategi dan langkah apa saja yang dilakukan oleh bank syariah dalam memitigasi terjadinya permasalahan *fraud* dalam dunia perbankan.

2. Secara Subjektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan keilmuan yang peneliti pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan perbankan syariah dan kecurangan yang ada di bank syariah.
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan

penelitian, baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Salah satu lembaga keuangan adalah perbankan. Lembaga perbankan adalah sebuah lembaga yang sangat penting dalam masyarakat pada saat ini dimana peran perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjembatani antara masyarakat yang defisit atau kekurangan dana dengan masyarakat yang surplus atau masyarakat yang memiliki kelebihan dana.⁶

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷ Perkembangan perbankan yang semakin maju menyebabkan munculnya lembaga-lembaga keuangan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

⁶ Adenk Sudarwanto, Suhardi, "Redenominasi Rupiah Sudah Diperlukan? ". *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 2 No. 3 (2010), h.78.

⁷ Kamsir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 13.

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dikenal dengan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁸

Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan dan risiko yang harus dihadapi dalam mempertanggung jawabkan bisnis yang menggunakan identitas syariah. Risiko merupakan bahaya. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁹

Lembaga perbankan merupakan *agent of trust*. Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.¹⁰ Untuk itu lembaga perbankan sangat memerlukan kepercayaan dari masyarakat agar kegiatan operasional bank tetap berjalan dengan lancar. Kepercayaan dari masyarakat sangat berkaitan dengan citra bank, apabila kepercayaan masyarakat hilang terhadap suatu bank, maka akan menyebabkan citra bank buruk dimata masyarakat yang akan

⁸ UU No 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (7).

⁹ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, h. 4.

¹⁰Lintang Rahmadhani, "Analisis Pengaruh CAR, Pertumbuhan DPK, Pertumbuhan Simpanan Dari Bank Lain dan Suku Bunga SBI Terhadap Pertumbuhan Kredit". (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro, Semarang, 2011), h. 21.

menyebabkan operasional bank tersebut menjadi terhambat. Untuk itu perlu adanya pengendalian internal serta manajemen risiko yang baik.

Tujuan manajemen risiko sendiri ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.¹¹ Untuk itu maka diperlukannya penerapan manajemen risiko yang baik dan juga diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai.

Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung mekanisme pengawasan dan regulasi. Sehubungan dalam hal tersebut maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang sesuai dengan regulasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal tersebut yang mendorong Bank Indonesia menetapkan suatu peraturan, yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang kemudian diperbarui dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.¹² Selain adanya risiko yang harus dikelola oleh bank, bank juga memiliki tantangan untuk tetap dapat bersaing. Tantangan terbesar dalam perbankan syariah antara lain untuk mempertahankan citra dan nama baik dimata nasabah agar tetap bisa menjaga kepercayaan nasabah kepada bank syariah.

¹¹ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 201.

¹² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (On-line), tersedia di: <http://www.bi.go.id> (6 Desember 2019).

Sejak berdirinya perbankan syariah, berbagai kontroversi muncul dari masyarakat. Masalah yang paling banyak disorot adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan islam yang masih dianggap belum layak. Hal tersebut timbul karena persepsi masyarakat yang ragu pada konsistensi entitas bisnis syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan usahanya.¹³ Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

Keraguan masyarakat tersebut seolah terjawab dengan munculnya kasus *fraud* (tindak kecurangan) yang terjadi di lembaga syariah seperti kasus yang terjadi di Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut, BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meski beridentitas syariah, tidak menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*).

Fraud (kecurangan) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana

¹³ Nidaul uswah Prasetyaningsih, “*Islamic Corporate Identify* dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Syariah”, 2010.

¹⁴ Ismail Marzuki, “Pengaruh Kualitas Pelayanan *Good Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2020), h.8.

tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.¹⁵

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Sebagai lembaga keuangan perbankan, bank syariah juga menghadapi risiko adanya tindakan *fraud*. Terlebih dengan masih banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat didalam perbankan namun tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam bidang perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan hukum positif dan syariat islam, tindakan *fraud* yang ditemukan pada bank syariah mempengaruhi nilai kredibilitas perbankan syariah dan nilai-nilai islami di mata masyarakat umum.

Dalam Al-Quran kita dapat menemukan permasalahan terkait dengan kecurangan (fraud) antara lain yaitu pada surat Al-Baqarah (2) : 188, yang berbunyi:

¹⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Produksi Dan Operasi* (Bandung: Alfabeta: 2012), h. 193.

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (On-line), tersedia di: <http://www.bi.go.id> (6 Desember 2019).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu (membawa) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat (2) : 188).

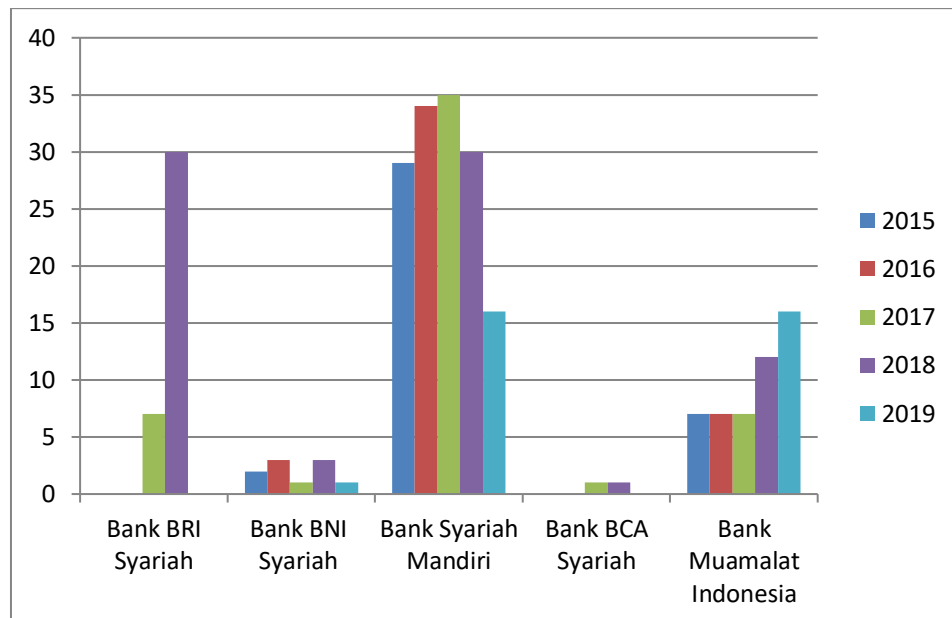
Dalam ilmu ekonomi islam tindakan *fraud* merupakan suatu tindakan yang sangat keji dan melampaui batas kewajaran karena memiliki unsur untuk pengutamaan kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri secara dzhalim yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan ekonomi islam.¹⁷ untuk itu perlu adanya tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan diluar batas kewajaran manusia.

Berikut adalah grafik jumlah internal *fraud* pada bank syariah di Indonesia¹⁸

¹⁷ Tulus Suryanto, Anip DwiSaputro, *Konsep Pencegahan Kecurangan Fraud Akuntansi Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran: 2016), h. 84.

¹⁸ Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Setiap Bank Syariah Periode 2015-2018

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Internal Fraud Bank Syariah Di Indonesia Periode
2015-2019



Sumber: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Setiap Bank Syariah Periode 2015-2019

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah dengan jumlah *fraud* tertinggi dengan nilai rata-rata 28 kasus pertahun. Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan total asset menembus lebih dari Rp. 100 Triliun pada tahun 2019.¹⁹ Dengan nilai tersebut, BSM memiliki tingkat risiko (kecurangan) yang lebih tinggi dibandingkan bank lainnya. Asset adalah salah satu konsentrasi yang paling rawan terhadap *fraud*. Untuk itu, diperlukan manajemen pengendalian *fraud* yang baik. Setidaknya dengan menjadikan standar penerapan strategi anti *fraud* yang diberlakukan BI sebagai acuan.

¹⁹ Ismail Marzuki, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud"...., h. 4.

Dalam rangka mengurangi adanya risiko atas kasus *fraud*, BSM KCP Kedaton Bandar Lampung melakukan upaya antara lain yaitu memeriksa setiap catatan transaksi.²⁰ Hal ini merupakan upaya untuk mendeteksi terjadinya kecurangan, dengan kata lain bank dapat melakukan pemeriksaan atas catatan transaksi atau laporan keuangan, mulai dari rekening pendapatan, asset, kewajiban, pengeluaran, hingga ekuitas. Biasanya tanda kecurangan akan terdeteksi dengan melihat adanya perubahan dalam laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan oleh BSM KCP Kedaton Bandar Lampung guna meminimalisir tindakan *fraud* yang membuat citra bank di mata masyarakat menjadi buruk dan berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat pada bank syariah.

Kehilangan kepercayaan dalam masyarakat akan berdampak pada penarikan dalam jumlah besar (*rush*) oleh masyarakat sehingga perbankan akan menjadi sulit dalam memenuhi likuiditasnya tentunya ini akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi perbankan yang pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan bahkan hingga mengalami kejatuhan (*collapse*).

Risiko terjadinya *fraud* di dunia perbankan sangat mudah terjadi baik didalam bank konvensional maupun bank syariah. Maka sebab itu perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut sebagai GCG (*Good Corporate Governance*) yang merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya *fraud*. Pihak internal perbankan juga

²⁰ M Yogi Sulandra, Wawancara dengan penulis, BSM KCP Kedaton Bandar Lampung, 20 April 2020.

seharusnya membentuk tim khusus untuk mencegah *fraud* tersebut, bahkan bank Indonesia mengeluarkan surat edaran (SE) No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum sebagai usaha untuk mencegah penyelewengan yang ada dan dapat merugikan masyarakat.²¹

Konsep GCG merupakan bagian dari tindakan pengendalian bank dalam menghadapi permasalahan *fraud* yang sudah sering terjadi dan diharapkan dengan adanya penerapan GCG, manajemen bank dapat melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap bank dengan baik sehingga akan membuat bank menjadi maju dan berkembang. Pengendalian dan pengawasan bank dengan GCG merupakan tindakan nyata bank dalam penerapan strategi anti *fraud*. Oleh karena itu, perbankan dituntut untuk meningkatkan tata kelola bank yang sehat dan manajemen risiko yang baik. Pelaksanaan manajemen risiko diuraikan dalam peraturan Bank Indonesia No 11/25/PBI/2009 dimana didalamnya dijelaskan bahwa peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung efektifitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.²² Dengan terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan nantinya dapat membantu pihak internal bank dalam menjaga asset, keuangan dan aktiva yang dimiliki oleh bank.

²¹ Irvan Noptriyani, “Strategi Mengatasi Internal *Fraud* Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”. (Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), h.4.

²² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (On-line), tersedia di: <http://www.bi.go.id> (6 Desember 2019).

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas tentang bagaimana mitigasi lembaga perbankan dalam mengatasi terjadinya kecurangan atau yang disebut sebagai *fraud* dengan judul “Mitigasi Risiko Bank Syariah Dalam Menangani Permasalahan Fraud Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada BSM KCP Kedaton Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan pelaksanaannya. Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana mitigasi dan mekanisme penanganan kasus fraud pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dan juga bagaimana mekanisme penanganan anti *fraud* menurut peraturan Bank Indonesia Serta menurut perspektif Ekonomi Islam.
2. Jenis tindakan *fraud* yang akan dibahas adalah tindakan *fraud* dalam operasional perbankan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dalam Menangani kasus *Fraud*?

2. Bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut Peraturan Bank Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme pencegahan penanganan tindakan anti *fraud* menurut perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dalam menangani kasus *Fraud*.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut Peraturan Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut perspektif Ekonomi Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian materi yang telah dijabarkan diatas maka manfaat yang akan dicapai adalah:

1. Manfaat Teoritis, manfaat penulisan ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran terkait dengan mitigasi risiko bank syariah dalam menangani permasalahan *fraud*.
2. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi masyarakat, informasi dan gambaran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai

mitigasi yang dilakukan oleh perbankan dalam meminimalisir tindakan *fraud* dalam dunia perbankan khususnya dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang telah mengaturnya.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²³

Berdasarkan uraian teori diatas, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Melalui pendekatan tersebut peneliti akan mengungkap mitigasi yang dilakukan bank syariah KCP Kedaton Bandar Lampung dalam menanggulangi risiko terjadinya *fraud*.

2. Sumber Data

Dilihat dari sumber datanya, pengambilan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

²³ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 83.

pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan pihak manajemen anti *fraud* pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁶ dalam penelitian ini merupakan data pendukung dari data primer dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa buku, jurnal, Peraturan Bank Indonesia dan lain-lain.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, salah satu bagian terpenting dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan

²⁴ *Ibid.*, h. 222.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁷

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memperoleh data. Wawancara terstruktur digunakan peneliti yang telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara terstruktur ini peneliti harus menyiapkan instrument pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan.²⁹ Pertanyaan-pertanyaan wawancara ini bertuliskan poin-poin terkait rumusan masalah dalam pelaksanaannya. Peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 317.

²⁹ *Ibid.*, h. 83.

monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada.³⁰ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan data dokumen berupa tulisan literatur maupun gambar.

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih objek lokasi di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, serta partisipan yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu pihak divisi anti fraud Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

Peneliti memilih partisipan dan lokasi ini dengan tujuan diharapkan partisipan dapat membantu peneliti dalam memahami masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam metode kualitatif dilakukan sebelum peneliti terjun kelapangan (pra lapangan), saat dilapangan, dan sesudah dilapangan.

a. Tahap pra lapangan mengikuti langkah-langkah antara lain yaitu

- 1) menyusun rancangan
- 2) memilih lapangan
- 3) mengurus perizinan

³⁰ *Ibid.*, h. 84.

- 4) menjajagi dan menilai keadaan
- 5) memilih dan memanfaatkan informan
- 6) menyiapkan instrument.³¹

b. Tahap saat dilapangan

Tahap pekerjaan lapangan dapat juga disebut dengan tahap ketika mengumpulkan data pada informan-informan dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu antara lain dengan:

- 1) Wawancara
- 2) Dokumentasi

c. Tahap sesudah dilapangan

Dalam penelitian kualitatif sesudah peneliti melakukan pekerjaan dilapangan, selanjutnya langkah yang dilakukan yaitu Langkah-langkah analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses perangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³²

³¹ Asep Suryana, "Tahapan-Tahapan Penelitiann Kualitatif". (Disertasi Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2007)

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h. 247.

2) Penyajian data

Menurut Miles and Huberman (1994), Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang bersifat naratif.³³

Dengan demikian, penyajian data merupakan langkah kedua setelah mereduksi data, untuk memudahkan peneliti memahami tentang apa-apa yang terjadi dilapangan yang dapat dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan grafik, matrik dan lain-lain.

3) Verifikasi

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁴ Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

³³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), H. 70.

³⁴ *Ibid.*, h. 252.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interval), uji *transverability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

a. Uji Kredibilitas

Bermacam-macam cara uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, traingulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchek*.³⁵

b. Uji *Transferability*

Uji *transferability* merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain.³⁶

c. Uji *Dependability*

Dependability disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau

³⁵ *Ibid.*, h. 270.

³⁶ *Ibid.*, h. 276.

mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.³⁷

d. Uji *Konfirmability*

Uji *konfirmability* disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektivitas bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi tetapi hasilnya ada.³⁸

³⁷ *Ibid.*, h. 277.

³⁸ *Ibid.*, h. 277.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mitigasi

1. Pengertian Mitigasi

Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.¹

2. Tujuan Mitigasi

Adapun tujuan dari adanya mitigasi antara lain yaitu:

- a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran agar bisa menghadapi risiko dan dampak yang akan terjadi dari adanya bencana
- b. agar mengurangi atau meminimalisir dari risiko atau bahkan dampak yang kemungkinan akan terjadi yang disebabkan suatu bencana. Misal kerugian ekonomi, Sumber Daya Alam.

B. Risiko

1. Definisi Risiko

Ferry N Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang

¹ Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 9 (On-line). Tersedia di: <http://www.alinea.id/kolom/mitigasi-dan-pelembagaan-penanggulangan-bencana-b1U7p9eyW> (5 Desember 2019).

ingin dicapai.² Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang kerugian atau kehancuran

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan. Baik bagi perusahaan atau lembaga maupun bagi perorangan.

2. Jenis-Jenis Risiko

Pada dasarnya, jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu risiko *financial* dan risiko *non financial*. Risiko *financial* terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Disisi lain risiko *non financial* terkait dengan kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang.

Adapun jenis-jenis risiko dalam dunia perbankan antara lain sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit di definisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit terjadi karena pihak kreditur yang tidak mampu memenuhi kewajiban hutangnya kepada pihak bank.

² Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, h. 4.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan dan tagihan diluar neraca. (*On And Off Balance Sheet*) yang timbul dari pergerakan harga pasar.

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

d. Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit adalah ketika penempatan aktiva produktif bank terkonsentrasi pada satu sektor atau kelompok tertentu. Apabila terjadi masalah pada sektor atau kelompok tersebut, maka aktiva produktif yang ditempatkan berada dalam bahaya.

e. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga pada bunga bank merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman atau simpanan.

f. Risiko Bisnis

Risiko bisnis merupakan risiko yang terkait dengan posisi persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis lebih berhubungan dengan keputusan bisnis yang diambil oleh dewan direksi bank dan

kaitannya dengan implikasi risiko yang mungkin timbul atas keputusan bisnis tersebut. dari sisi waktu risiko bisnis bersifat jangka pendek atau menengah.

g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Risiko ini dapat dikaitkan dengan implementasi dari strategi-strategi mereka.

h. Risiko Reputasional

Risiko reputasional adalah risiko kerusakan potensional pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif.³

C. Manajemen Risiko

1. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi didalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha, dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan⁴

Risiko merupakan komponen yang tidak terlepas dalam setiap aktivitas bank, ditambah dengan arus globalisasi yang berkembang pesat yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat sektor perbankan menjadi sektor dengan risiko

³ *Ibid.*, h. 22-24.

⁴ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, h. 199.

yang tinggi, oleh sebab itu perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang kuat.

Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁵

2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko setidaknya mencakup beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.⁶

3. Proses Manajemen Risiko

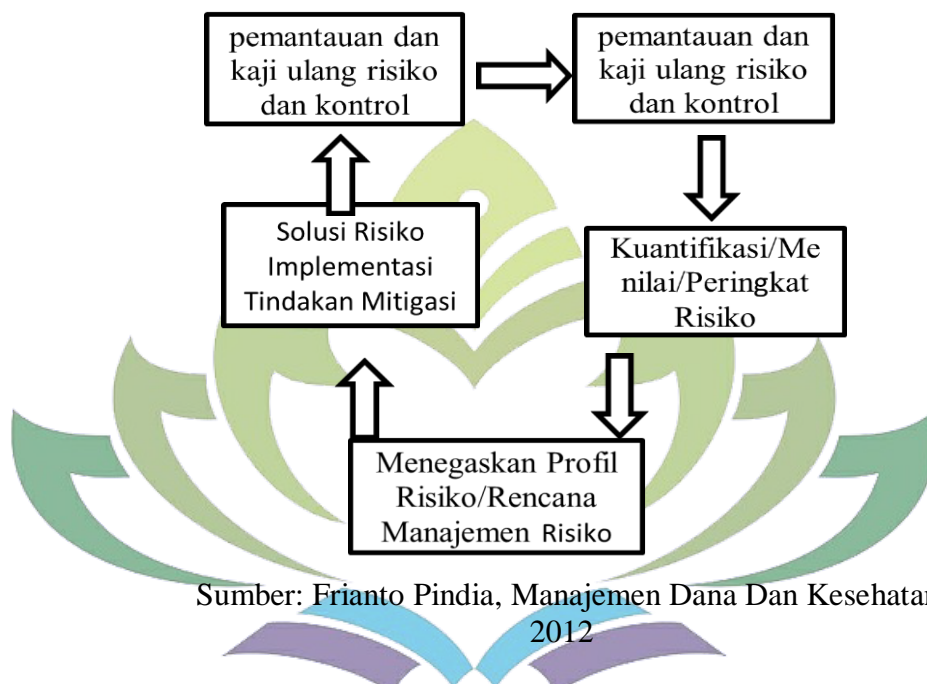
Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang

⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 199.

⁶ H. Masyhud Ali, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 313.

mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.⁷

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko



Sumber: Frianto Pindia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, 2012

Dalam pelaksanaannya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional serta risiko dari produk dan kegiatan usaha

⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, h. 199.

- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dari prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko serta
- c. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material
- d. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko serta penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material
- e. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bank.⁸

4. Penerapan Manajemen Risiko

Menurut surat edaran kepada seluruh bank umum di Indonesia Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, dalam rangka menendalikkan risiko terjadinya penyimpangan, bank wajib menerapkan manajemen risiko bagi bank umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, h. 259-260.

a. Pengawasan Aktif Manajemen

Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud* dalam melakukan penerapan manajemen risiko secara umum. Keberhasilan penerapan strategi anti-*fraud* secara menyeluruh sangat tergantung dari arah dan semangat Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

b. Struktur Organisasi Dan Pertanggungjawaban

Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi bank untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud*. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

c. Pengendalian Dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *fraud*. Pemantauan *fraud* perlu

dilengkapi dengan sistem informasi memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *fraud* pada bank.⁹

5. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang hendak dicapai dalam manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Adapun sasaran utama yang ingin dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*)
- b. Ketenangan dalam berfikir
- c. Memperkecil biaya (*least cost*)
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- e. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi
- f. Mengembangkan pertumbuhan dalam perusahaan
- g. Mempunyai tanggung jawab social terhadap karyawan.¹⁰

D. Lembaga Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan yang berkaitan dengan keuangan. Bank dijadikan sebagai tempat untuk bertransaksi seperti tempat penyimpanan uang,

⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP/2011 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Pada Bank Umum (On-line), tersedia di: <http://www.bi.go.id> (10 Desember 2019).

¹⁰ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, h. 201.

melakukan investasi, pengiriman uang serta melakukan pembayaran maupun tagihan.

pengertian bank menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹¹

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi kegiatan perekonomian di Indonesia. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat dimana debitur dalam pengembalian pinjaman diharuskan membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal dengan sistem perbankan konvensional. Selama lebih dari dua dekade terakhir, telah muncul sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga namun menggunakan sistem bagi hasil.¹² Perbankan ini dikenal sebagai perbankan syariah.

Menurut ensiklopedi islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa

¹¹ Kamsir, *Manajemen Perbankan*, h. 13.

¹² M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 39

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.¹³

Berdasarkan rumusan tersebut bank islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu pada ketentuan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-hadist.

2. Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, bank terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

3. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu fungsi lain perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat atau

¹³ Warkum Sumirto, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, h.5

¹⁴ Sulyanto , Dian Purnomo Jati, “Perbandingan Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Umum Dengan Pendekatan Data Envelopment Aanalysis”. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, Vol. 18 No. 2 (2014), h. 298.

pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.

- b. Penghimpun dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara.
- c. Melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan cara efisien, sehat, wajar, dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal dan mendunia dan menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang produktif bukan konsumtif.
- d. Meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi bank bukan hanya sebagai penghimpun dan penyalur dana tetapi bank juga sebagai lembaga intermediary dan menjadi *Agent Of Trust*.

4. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Di Indonesia bank yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya cukup terlambat bila dibandingkan dengan Negara-

¹⁵ Djoni S. Ghazali, Rachman Usman, *Hukum Perbankan* (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2010), h. 141.

Negara muslim lainnya, namun perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹⁶

Perkembangan bank syariah dilatar belakangi oleh terjadinya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1998 yang telah melumpuhkan berbagai sektor usaha di Indonesia, salah satu sektor yang terkena dampak besarnya adalah sektor perbankan. Dengan terpuruknya kinerja perbankan nasional banyak bank yang harus melakukan konsolidasi melalui merger dengan bank lain atau diambil alih oleh pemerintah bahkan diantaranya dibekukan dan dilikuidasi. Akan tetapi dalam kondisi yang terpuruk tersebut masih ada harapan dengan tetap eksisnya perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yang berdasarkan pada syariat islam. Terbukti bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terkena *negative spread* pada saat krisis. Hal ini dikarenakan BMI tidak memasuki variabel riba yang dilarang agama islam, melainkan prinsip bagi hasil dalam transaksinya.

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, h. 25.

Perkembangan perbankan syariah semakin besar sejak dikeluarkannya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dimana terdapat perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.¹⁷

E. Fraud

1. Definisi *Fraud*

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan atau unit syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan perusahaan atau unit syariah dan atau menggunakan sarana perusahaan atau unit syariah sehingga perusahaan atau unit syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

¹⁷ Warkum Sumirto, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, h. 71-72.

¹⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/ SEOJK.05/2016 Tentang Pengendalian Fraud Dan Penerapan Strategi Anti Fraud (On-line), tersedia di: <http://www.ojk.go.id> (15 Desember 2019).

2. Bentuk-Bentuk Fraud

Sukrisno Agoes mengatakan bahwa kekeliruan dan kecurangan bisa terjadi dalam beberapa bentuk yaitu:

a. *Intentional Error*

Kekeliruan bisa disengaja dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dalam bentuk *window dressing* (merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank).

b. *Unintentional Error*

Kecurangan yang terjadi secara tidak disengaja, misalnya salah menjumlah atau penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan.

c. *Collusion*

Kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga.

d. *Intentional Misrepresentation*

Memberi saran sesuatu itu benar, padahal itu salah oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.

e. *Negligent Misrepresentation*

Pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu benar.

f. *False Promise*

Sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut.

g. *Employee Fraud*

Kecurangan yang dilakukan pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri, hal ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya *office boy* yang memainkan bon pembelian makanan sampai pegawai yang memasukan pengeluaran pribadi untuk keluarganya sebagai biaya perusahaan.

h. *Management Fraud*

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain termasuk pemerintah. Misalnya, memanipulasi pajak, kredit bank, kontraktor yang menggunakan *cost plus fee*.

i. *Organized Crime*

Kejahatan yang terorganisasi, misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya dimana sipelaksana akan mendapat bagian 10%.

j. *Computer Crime*

Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer, sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.

k. *White Collar Crime*

Kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (kalangan atas), misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger dan lain-lain.¹⁹

3. Faktor Penyebab Fraud

Adanya peluang atau situasi yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan dapat menyebabkan seseorang yang sebelumnya tidak berniat melakukan kecurangan menjadi ingin melakukannya. Berikut adalah teori terkait faktor pendorong terjadinya *fraud*:

a. Teori $C = N + K$ ²⁰

Dengan :

C = *Criminal*

N = Niat

K = Kesempatan

b. *Fraud Triangle Theory*

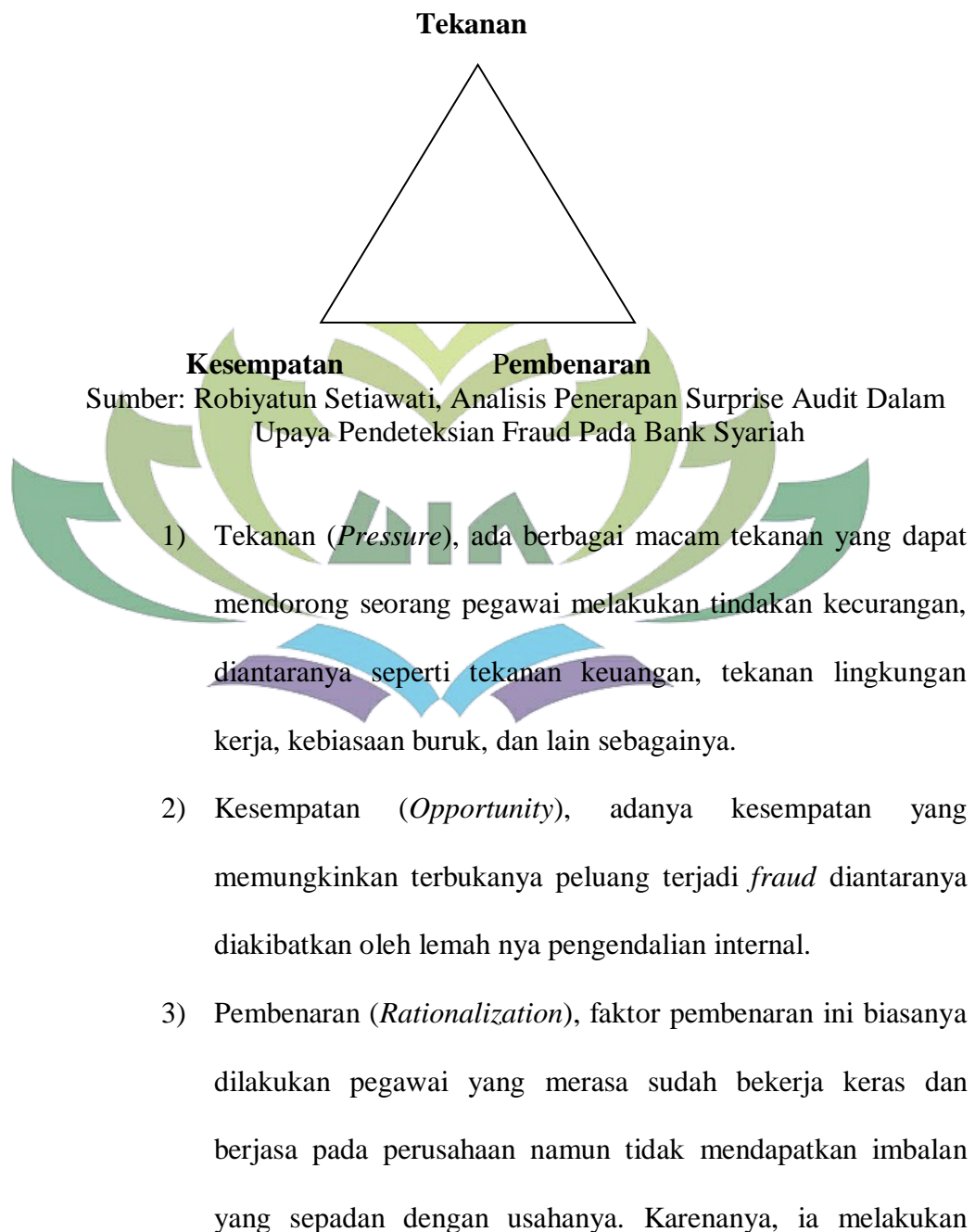
Konsep teori ini bertumpu pada riset Donald Cressey (1953) yang merupakan pendiri *Association Of Certified Fraud Examiner* (ACFE). Riset ini menyimpulkan bahwa *fraud* mempunyai tiga sifat umum yang kini lebih dikenal dengan segitiga *fraud* atau *Fraud Triangle*. Dalam teori segitiga, perilaku *fraud* di dukung oleh tiga unsur, yaitu adanya tekanan, kesempatan dan

¹⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Produksi Dan Operasi*, h. 195-197.

²⁰ Karyono, *Forensic Fraud* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), h. 8.

pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot atau derajat ketiga unsur itu sama.

Gambar 3.1
Unsur Pendorong Perilaku Fraud Berdasarkan Teori Segitiga Fraud



kecurangan dengan alasan pembenaran atas apa yang dilakukannya.²¹

4. Pengendalian *Fraud* Dalam Perbankan

Dalam rangka pengendalian *fraud*, perusahaan atau unit syariah melakukan penguatan pada aspek, antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Manajemen

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab secara umum mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*. Keberhasilan pengendalian *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan atau unit syariah. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi perusahaan atau unit syariah.

b. Struktur Organisasi Dan Pertanggungjawaban

Perusahaan atau unit syariah membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian *fraud* dalam organisasi perusahaan atau unit syariah. Pembentukan unit atau fungsi ini disertai wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

²¹ Wahyuni, Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Fraud Triangle Sebagai Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 21 No. 01 (2017), h.. 50-52.

c. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *fraud* berperan penting dalam mendukung penerapan strategi anti *fraud* serta dalam upaya meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan atau unit syariah. Pemantauan *fraud* juga perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *fraud* pada perusahaan atau unit syariah.

d. Edukasi dan Pelatihan

Dalam meningkatkan peran serta bagi pegawai yang terlibat penerapan strategi anti *fraud*, perusahaan wajib memiliki rencana edukasi dan pelatihan, rencana edukasi dan pelatihan yang dilakukan meliputi:

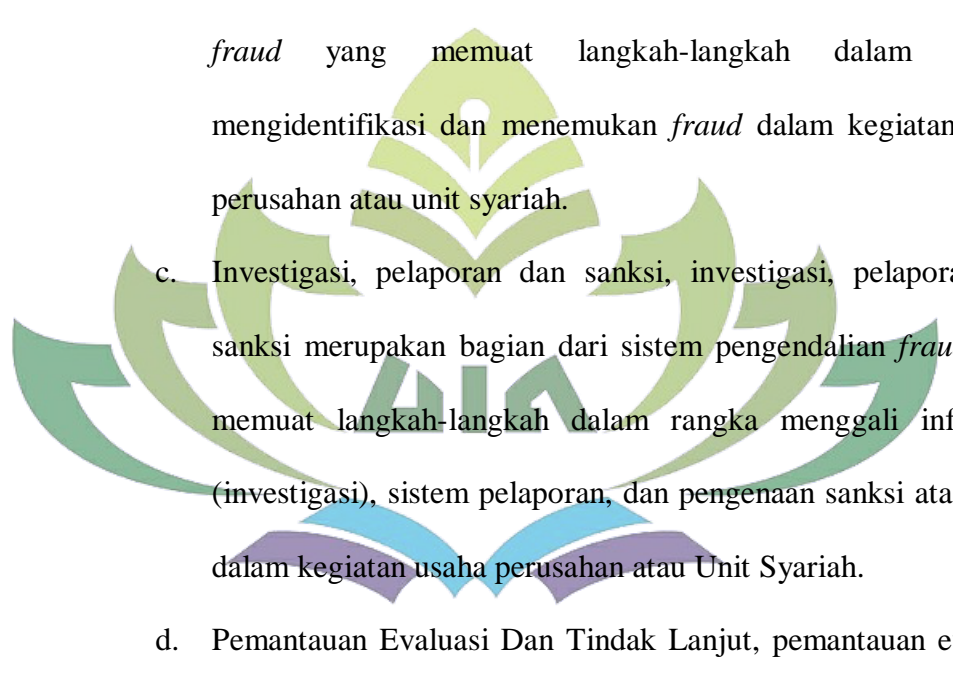
- 1) Edukasi dan pelatihan secara reguler seperti *underwater*, *adjuster*, *klaim representative*, *appointment agen*, hukum dan lain-lain
- 2) Dilakukan didalam atau diluar perusahaan atau Unit Syariah
- 3) Tahapan dan waktu penyelenggaraan dalam jangka waktu satu tahun
- 4) Etika dan aspek hukum lainnya.²²

5. Mekanisme/Penerapan Strategi Anti Fraud

Dalam surat Edaran OJK Nomor 05/2016 Tentang Pengendalian

Fraud Dan Strategi Anti Fraud. Strategi anti *fraud* terdiri dari:

²² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/2016 Tentang Pengendalian Fraud Dan Strategi Anti Fraud (On-line), tersedia di: <http://www.ojk.go.id> (15 Desember 2019).

- 
- a. Pencegahan, pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang dalam pelaksanaannya memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi kemungkinan risiko terjadinya *fraud*, yang paling sedikit mencakup antara lain anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
 - b. Deteksi, deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha perusahaan atau unit syariah.
 - c. Investigasi, pelaporan dan sanksi, investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha perusahaan atau Unit Syariah.
 - d. Pemantauan Evaluasi Dan Tindak Lanjut, pemantauan evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.²³

²³ *Ibid.*

F. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran islam, tanpa mengandalkan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.²⁴

Secara istilah pengertian Ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar Ekonomi Islam. Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi, Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, akal pikiran, dan pengalaman. M Abdul Manan mendefinisikan Ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami dengan nilai-nilai islam. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh M.M Metwally bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (orang yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Quran, Hadis Nabi, ijma, dan qiyas. Menurut Yusuf Al Qardhawi, Ekonomi Islam adalah ekonomi yang

²⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islami*, h. 5.

berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁵

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik dalam Ekonomi Islam yang menjadi *core* ajaran Ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek dalam Ekonomi Islam yang mencakup aspek normatif-idealis-deduktif dan juga historis-empiris-induktif. Adapun karakteristik Ekonomi Islam antara lain:

- a. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari tuhan), Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di beberapa teks Al-Quran dan hadis yang muncul pada abad ke-6 masehi. Walaupun dalam catatan sejarah Ekonomi Islam pernah mati suri, namun perlahan-lahan kajian tentang Ekonomi Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat.
- b. *Rabbaniyah Al Hadf* (bertujuan untuk tuhan), selain bersumber dari Allah, Ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya segala aktivitas Ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan hanya di wilayah masjid, mushala, langgar dll. Beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi meliputi area pasar, perkantoran, pasar modal dan perbankan. Lebih dari itu,

²⁵ Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Surabaya:Kencana, 2016), h. 1-2.

Islam mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah disegala penjuru di muka bumi ini, tidak mendzalimi orang lain dan bertujuan member kemaslahatan umat manusia.

c. *Al Raqabah al Mazdujah* (kontrol didalam dan diluar), Ekonomi

Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat didalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar yang melibatkan institusi, lembaga ataupun seorang pengawas. Kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenalkan lembaga pengawas syariah pasar (*hisbah*) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan didalam pasar.

d. *Al jamu bayna al Tsabat wa al Murunah* (penggabungan antara

yang tetap dan yang lunak), ini terkait dengan hukum dalam Ekonomi Islam. Islam mempersilakan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebaskan-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktivitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian, dan tidak bias ditawar lagi. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang lunak dan boleh dilakukan, terlebih lagi boleh dieksplorasi dengan sebebaskan-

bebasnya karna bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

e. *Al Tawazun bayna al-Maslahah. al Fard wa al Jamaah*

(keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat), Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam Ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

f. *Al Tawazun bayna Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara

materi dan spiritual), islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Akan tetapi pemenuhan terhadap aspek materi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.

g. *Al Waqi iyah* (realistis), Ekonomi Islam bersifat realistis, karena

sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bias mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa

mengadopsi segala sistem yang ada dengan catatan membuang aspek keharaman didalamnya.²⁶

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.

Dalam Hadist nabi yang berbunyi “*sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia.*” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqtni Nomor 3289) Hadist ini di hasankan oleh al-Albani dalam shahihul jami’. Hadist tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi islam yaitu memberi maslahah kepada kehidupan manusia.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan benefit dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan menjaga kemaslahatan *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya

²⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 31-34.

kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.²⁷

G. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa karya terdahulu yang penulis temukan terkait dengan pembahasan mengenai *fraud* pada perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Atik Emilia Sula dkk dengan judul “Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa konsep penting yaitu kemungkinan adanya kecenderungan tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah, strategi anti *fraud*, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk *fraud preventive*.²⁸ Kajian yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan diakhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat dengan objek penelitian yakni lembaga keuangan syariah secara global. Kesimpulan

²⁷ *Ibid.*, h. 12-13.

²⁸ Atik Emilia Sula, “Pengawasan, Strategi Anti *Fraud* Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Jaffa*, Vol. 02 No. 2 (2014), h. 91.

yang dihasilkan dari penelitiann ini adalah bahwasannya kecenderungan tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah diharapkan mampu dikendalikan dengan adanya strategi anti *fraud* yang efektif yang dimiliki masing-masing entitas. Selain itu, diharapkan sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan maksimal oleh lembaga yang berwenang sehingga nantinya kedua komponen tersebut mampu bersinergi dengan standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk *fraud preventive*. Keterkaitan dengan penelitian ini terletak pada strategi anti *fraud* atau mitigasi risiko *fraud*.

2. Karya Haifa Najib dan Rini yang berjudul “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan *Fraud* Pada Bank Syariah”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari kepatuhan syariah dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud*. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *Islamic Corporate Governace* dan kepatuhan syariah dengan proksi *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Investment Ratio*.²⁹ Penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah dengan *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah sedangkan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, dan *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Keterkaitan dengan penelitian ini terletak pada kasus yang

²⁹ Haifa Najib dan Rini, “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan *Fraud* Pada Bank Syariah”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2016), h. 131

akan dibahas yaitu *fraud* Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini tidak mencari adanya pengaruh antara variabel satu dan variabel lainnya. Tetapi untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko anti *fraud*.

3. Karya Nopi Hermawati yang berjudul “Pengaruh Peran Audit Internal Dan Peran Komite Audit Terhadap Pencegahan Fraud”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berupa fakta-fakta dan mengetahui pengaruh peran audit internal dan peran komite audit terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan *Struktural Equation Method – Partial Square (SEM-PLS)* dengan bantuan program smart PLS untuk mengetahui nilai kontribusi atau pengaruh Peran Audit Internal dan Peran Komite Audit terhadap pencegahan *fraud*.³⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor internal dan Komite Audit pada Bank Umum Syariah secara parsial berperan efektif dalam upaya pencegahan *fraud* dan peran Auditor Internal dan Komite Audit berkontribusi simultan dalam pencegahan fraud. Keterkaitan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang akan dibahas yaitu *fraud*, Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini tidak mencari adanya pengaruh antara variabel satu dan variabel lainnya. Tetapi untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko anti *fraud*.

³⁰ Nopi Hernawati, “Pengaruh Peran Audit Internal Dan Peran Komite Audit Terhadap Pencegahan Fraud”. *Jurnal*, Universitas Islam Bandung, h. 68.

4. Karya Rita Anugerah yang berjudul “Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud”. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh dalam mencegah dan mengurangi terjadinya *fraud*. *Fraud* dapat terjadi apabila dipenuhi tiga unsur dalam fraud triangle yaitu: adanya peluang, motif dan rasionalisasi. Untuk mencegah dan mengurangi *fraud* perlu pemahaman dengan struktur, mekanisme, prinsip dan fungsi Corporate Governance. Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan atau organisasi, dan untuk mencegah terjadinya *fraud* diperlukan kombinasi mekanisme tatakelola internal dan eksternal yang dijalankan secara bersamaan.³¹ Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu mitigasi risiko anti *fraud*.
5. Karya Ida Bagus Dwika Maliawan DKK yang berjudul “Pengaruh Audit Internal Dan Efektifitas Pengendalian Interen Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan efektifitas pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dimana ada pengaruh audit internal dan efektifitas pengendalian interen terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Populasi dalam sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan sampel 40 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Metode pengumpulan data yang

³¹ Rita Anugerah, “Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 (2014), h. 101-103.

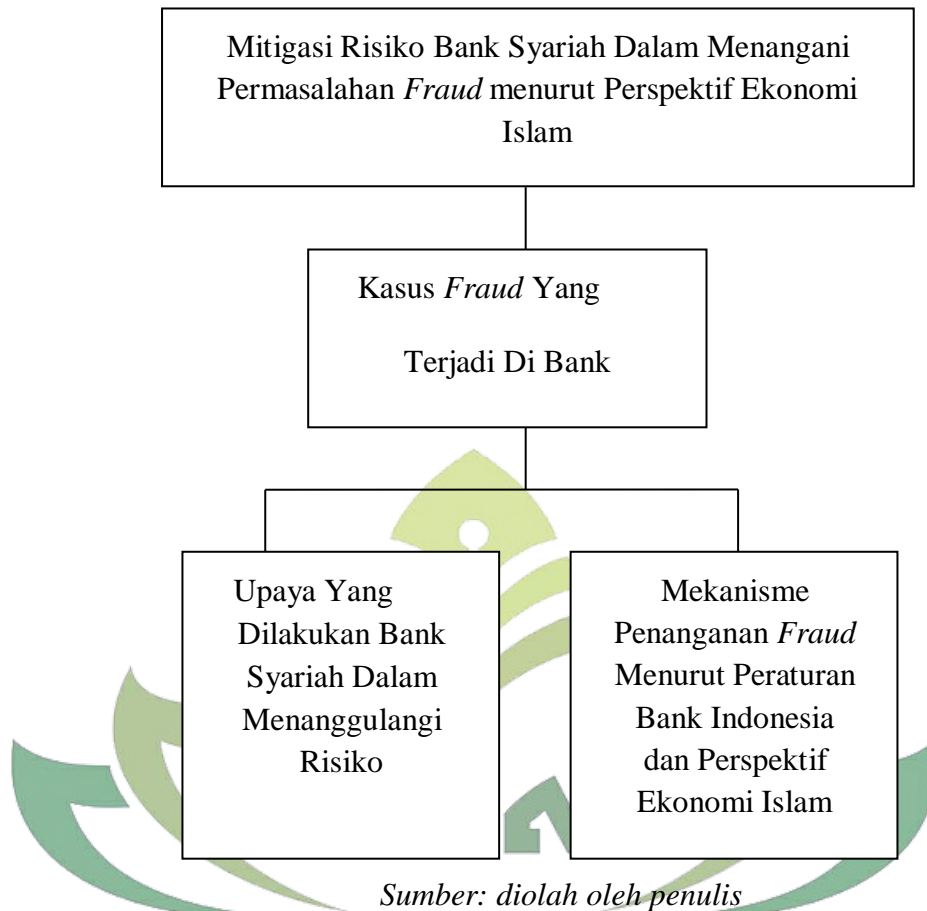
dilakukan adalah dengan survey melalui pembagian kuisioner kepada responden. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 19.00. Hasil penelitian yang dilakukan Ida Bagus ini menunjukkan bahwa audit internal dan efektivitas pengendalian interen secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).³² Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini tidak mencari adanya pengaruh antara variabel satu dan variabel lainnya. Tetapi untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko anti *fraud*.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir untuk penelitian ini adalah:

³² Ida Bagus Dwika Maliawan, Edy Sujana, Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Audit Internal Dan Efektifitas Pengendalian Interen Terhadap Pencegahan Kecurangan (FRAUD)". *jurnal kuntansi*, Vol. 8 No. 2 (2017), h. 1.

Gambar 4.1 Kerangka Berfikir

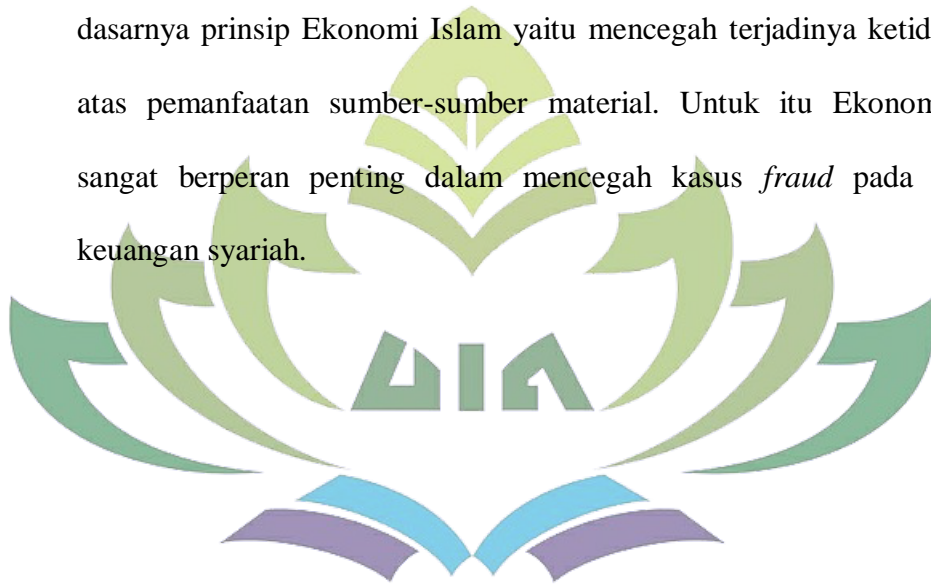


Sumber: diolah oleh penulis

Pada penelitian ini untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu penelitian. Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa mitigasi risiko merupakan variabel bebas (*independen*), sedangkan variabel terikat (*dependen*) adalah permasalahan *fraud*.

Seiring dengan maraknya kasus *fraud* atau penyimpangan yang sering terjadi di lembaga keuangan khususnya perbankan syariah, maka mitigasi dan penanganan atas kasus *fraud tersebut* dirasa perlu untuk

dilakukan oleh setiap bank syariah. Dalam mengatasi kasus *fraud* bank Indonesia telah mengatur melalui Peraturan Bank Indonesia yang tertuang dalam SEBI yang bernomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Dalam memitigasi terjadinya kasus *fraud* pada lembaga keuangan syariah, selain adanya peraturan dari Bank Indonesia, Ekonomi Islam juga dirasa perlu dalam membentengi bank syariah dalam memerangi kasus *fraud*. Karena pada dasarnya prinsip Ekonomi Islam yaitu mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber material. Untuk itu Ekonomi Islam sangat berperan penting dalam mencegah kasus *fraud* pada lembaga keuangan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2) : 188.

Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Fahmi, Irham, *Manajemen Produksi Dan Operasi*, Bandung: Alfabeta, 2012

Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Ghozali, Djoni S, Rachman Usman, *Hukum Perbankan*, Banjarmasin: Sinar Grafika, 2010

Hikmawati, Fenti, *Metode Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Surabaya: Kencana, 2016

Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbanka*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Iqbal, Zamir, Abbas Mirakhor, *pengantar Keuangan Islam :Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Kamsir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Karyono, *Forensic Fraud*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013

Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Pandia, Frianto, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Salim, Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait (Takaful dan Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Suryanto, Tulus, Anip DwiSaputro, *Konsep Pencegahan Kecurangan Fraud Akuntansi Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2016

Alfian, Nurul, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan *Fraud*". *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol. 1 No. 2 (2016)

Anugerah, Rita, "Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan *Fraud*" *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 (2014)

Hernawati, Nopi, "Pengaruh Peran Audit Internal Dan Peran Komite Audit Terhadap Pencegahan *Fraud*" *Jurnal*, Universitas Islam Bandung

Maliawan, Ida Bagus Dwika, Edy Sujana, Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Audit Internal Dan Efektifitas Pengendalian Interen Terhadap Pencegahan Kecurangan (FRAUD)" *jurnal kuntansi*, Vol. 8 No. 2 (2017)

Marzuki, Ismail, "Pengaruh Kualitas Pelayanan *Good Coorporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud*" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung

Muthoharah, Annisa, "Efektifitas Pengawasan Unit Kerja Anti Fraud Pada Bank Muamalat Indonesia" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017

Najib, Haifa dan Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan *Fraud* Pada Bank Syariah" *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2016)

Noptriyani, Irvan, "Strategi Mengatasi Internal Fraud Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh" Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

Sula, Atik Emilia, "Pengawasan, Strategi Anti *Fraud* Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud* Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Jaffa*, Vol. 02 No. 2 (2014)

Suliyanto, Dian Purnomo Jati, "Perbandingan Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Umum Dengan Pendekatan Data Envelopment Aanalysis". *Jurnal keuangan dan Perbankan*, Vol. 18 No. 2 (2014)

Wahyuni, Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Fraud Triangle Sebagai Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan" *Jurnal Akuntansi*, Vol. 21 No. 01 (2017)

Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

Prasetyaningsih, Nidaul uswah, Islamic Corporate Identify dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Syariah, *Artikel Ilmiah*, 2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Strategi Anti Fraud Pada Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/ SEOJK.05/2016 Tentang Pengendalian Fraud Dan Penerapan Strategi Anti Fraud

Surat Keputusan BI No. 27/162/KEP/ DIR Perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah

www.mandirisyariah.co.id

[www.Jdih.bpk.go.id/Informasihukum/Fraud\(Kecurangan\).Pdf](http://www.Jdih.bpk.go.id/Informasihukum/Fraud(Kecurangan).Pdf)

